

**KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT
TERHADAP NUKLIR IRAN**



Tgl. Terbit	2 - 12 - 08
Angka	325 pul
Bany	1 lks
Slang	Wahias
No. 1001	
No. 1002	

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana
Pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh :

**ABDUL HALIK
E 131 01 728-2**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Nuklir Iran
Nama : Abdul Halik
Nomor Pokok : E 131 01 728-2
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

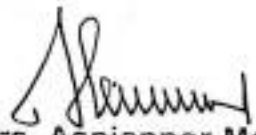
Makassar, 27 November 2008

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. A. Ya'kub, M.Si
Nip : 131 907 682

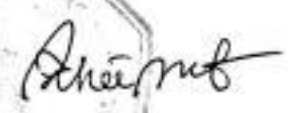

Drs. Aspiannor Masrie
Nip : 131 992 457

Mengetahui,

Pembantu Dekan I

Ketua Jurusan


Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA
Nip : 130 936 998


Drs. Patrice Lumumba, MA
Nip : 131 658 796



HALAMAN TIM PENERIMAAN EVALUASI

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Judul : "Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Nuklir Iran" untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tanggal 24 September 2008

Menyetujui :

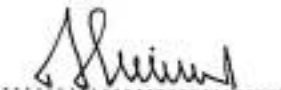
Ketua : Drs. Patrice Lumumba, MA



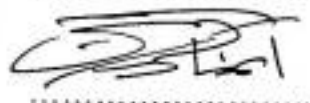
Sekretaris : Pusparida Syahdan, S.Sos. M.Si



Anggota : Drs. Aspiannor Masrie



Agussalim, S.IP. MIRAP



ABSTRAKSI

Abdul Halik, E 131 01 728-2, skripsi berjudul : *Kepentingan Amerika Serikat terhadap nuklir Iran*, di bawah bimbingan Drs. A. Ya'kub, M.Si selaku pembimbing I dan Drs. Aspiannor Miasrie sebagai pembimbing II, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini bertujuan, *pertama*, untuk mengetahui apa kebijakan Amerika Serikat terhadap Nuklir Iran, *kedua*, untuk mengetahui faktor penyebab Amerika Serikat memberikan kebijakan terhadap nuklir Iran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian preskriptif yaitu gabungan antara tipe penelitian eksplanatif dan prediktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library reseach*) yaitu dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan, berupa: buku-buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, dan website yang merupakan data valid. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif sedangkan data kuantitatif yang bersifat kualitatif memperkuat analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengembangkan program nuklir, Iran memperoleh *bargaining position* yang lebih besar baik itu di Timur Tengah maupun dunia internasional. Pemerintah Amerika Serikat dalam menyikapi isu nuklir Iran ini, begitu keras. Ini dalam bentuk pemerintah Amerika Serikat memprakarsai para anggota Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1737 dan 1747. Namun sejumlah Resolusi itu tidak memuat gentar pemerintah Iran, bahkan pemerintah Iran balik mengancam Amerika Serikat.

KATA PENGANTAR

"Bismillahirrahmanirrahim"

Tiada kata yang pantas mengungkapkan rasa syukur penulis, kecuali ucapan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menuntaskan pengerjaan skripsi ini, yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Namun demikian, Penulis secara sadar merasa bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penulis banyak mengharapkan kritikan dan masukan dari para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini, penulis ingin persembahkan kepada orang tua tercinta, berkat jasa, doa dan kasih sayang mereka jua-lah, penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Juga kepada Iche istriku yang tercinta, Adjie dan Iano La Katoda ipar-iparku yang tidak pernah berhenti memberikan dorongan moril kepada saya hingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan rasa terima kasih pada :

1. Bapak Drs.H. Nurdin Nara, M.Si, selaku Ketua Program Reguler Sore, Fisip Unhas.
2. Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan

Internasional, FISIP UNHAS.

3. Bapak Drs. H. A. Ya'kub, M.Si dan Bapak Drs. Aspiannor Masrie, sebagai Konsultan I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi.
4. Staf Tata Usaha Program Studi Hubungan Internasional, Fisip Unhas: Mr. Syape'i, Ridho, Pa Jaya dan Ibu Neni.
5. Sahabatku tercinta Ambar P S dan Bahtian yang senantiasa bersedia membantuku dalam segala kesempatan (thank's buat semuanya), juga teruntuk sahabat karibku Ali Kalute, thank's a lot. Spesial for Iche (my lovely wife), thank's atas seluruh dorongan moril dan bantuanmu selama ini, seluruh Crew pondok Rafika, Arul, Rob, Cinnong, Ulex, Kribo dan teman-teman dalam komunitas H I.
6. Al Awalul Wal Akhiru, Allah SWT untuk segala nikmat dan kasih sayang yang telah Engkau berikan pada hamba-Mu di dunia dan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, shalawat dan salam ku haturkan kepadamu serta ke'luargamu Ya' Habiballah.

Akhirul Kalam, semoga hasil dari karya tulis akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin

Makassar, 05 September 2008
Penulis,

Abdul Halik

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Tim Penerimaan Evaluasi.....	iii
Abstraksi	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Politik luar Negeri.....	11
B. Kepentingan Nasional	16
C. Konsep NPT	21

BAB III GAMBARAN UMUM NUKLIR IRAN

A. Profil Nuklir Iran	25
B. Kebijakan Nuklir Iran.....	30

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Nuklir Iran.....	40
1. Sanksi Ekonomi.....	40
2. Sanksi Politik.....	43
B. Penyebab AS Memberikan Kebijakan Terhadap Nuklir Iran	47
1. Terganggunya Kepentingan Ekonomi AS.....	47
2. Kekhawatiran Akan Pembuatan Senjata Nuklir.....	52

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	60
B. Saran-Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------



UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan energi abad ini merupakan kebutuhan yang esensial di tengah menipisnya sumber daya alam yang ada. Sehubungan dengan hal di atas, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah isu global dalam menjaga kelangsungan hidup, kaitan dengan keterbatasan sumber daya alam, dan pengaruh penggunaan sumber energi tersebut terhadap lingkungan.

Teknologi nuklir dapat dikembangkan menjadi energi alternatif dan dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik sehingga bisa menjadi kontributor yang kompetitif dengan sumber energi listrik lainnya seperti batu bara, minyak, gas, air, dan lainnya. Awal dari renaissance teknologi nuklir untuk saat ini dan masa datang ditandai dengan kemajuan *Non Proliferation Treaty* (NPT) dan penghargaan Nobel sebagai penghargaan internasional bagi kemajuan *International Atomic Energy Agency* (IAEA).¹

Masih hangat di pikiran kita krisis nuklir Iran yang menjadi sorotan pada akhir tahun lalu yang kemudian menjadi isu hangat beberapa waktu ke depan dikarenakan niat Iran untuk melanjutkan program nuklirnya untuk tujuan pembangkit tenaga listrik. Negara-negara maju seperti AS, beberapa negara

¹ <http://www.beritaiptek.com/zberita-beritaiptek-2006-03-02>

Eropa, dan termasuk Rusia menolak program tersebut meskipun dengan alasan untuk mengembangkan teknologi nuklir.

Alasan utama penolakan program nuklir Iran ini adalah kecurigaan penyalahgunaan program tersebut untuk tujuan persenjataan nuklir. Bahkan ketidaksetujuan negara-negara tersebut akan membawa masalah itu ke dewan keamanan PBB dan mendesak IAEA sebagai organisasi nuklir dunia untuk membrikan informasi terkait program nuklir Iran. Penolakan tersebut dilanjutkan oleh beberapa negara dengan berinisiatif melakukan pertemuan terbatas dalam rangka meluluskan keinginan agar permasalahan krisis nuklir Iran segera dibawa ke dewan keamanan PBB.

Iran yang dalam posisi terdesak pun tidak mau kalah "gertak", dengan memberitahukan bahwa AS dan Eropa akan merugi dikarenakan sebetulnya mereka masih memerlukan Iran yang diketahui sebagai perghasil minyak keempat terbesar di dunia. Pandangan berbeda kedua pihak terhadap isu nuklir tersebut dikarenakan perbedaan pijakan yang diambil, meskipun berasal dari teknologi yang sama akan sangat sulit untuk dicari jalan keluarnya. Pandangan Iran mengacu atas dasar kebutuhan dan keinginan pengembangan teknologi, sedangkan pandangan lain berdasar atas kekhawatiran dan kecurigaan akan terjadinya penyelewengan program tersebut.

Bagian pertama telah disepakati bahwa setiap negara mempunyai hak untuk mengembangkan teknologi tanpa intervensi negara lain. Pada sisi lain, hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi negara dimana nuklir bisa

menjadi salah satu alternatif sumber energi. Sebagai negara merdeka seperti Iran tentu mereka berhak mempunyai kebijakan tersebut dan karena juga punya kemampuan sumber daya alam dan manusia yang mereka miliki untuk mengembangkan program pengayaan uraniumnya.

Pandangan kedua merupakan pandangan yang paling sulit dipecahkan terutama adanya kepentingan politik global, dimana isu ini merupakan turunan dari perang dingin yang terjadi antara AS and Rusia terutama dalam program NPT. Ditambah isu nuklir Korea Utara dan isu terorisme.

Pengembangan energi nuklir untuk tujuan sipil seperti reaktor nuklir pembangkit energi dimulai secara intensif setelah konferensi *Genewa On The Peaceful Uses of Atomic Energy* yang disponsori oleh PBB tahun 1955. NPT mengisyaratkan adanya kemauan yang begitu keras berkaitan dengan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai atau sipil.² Pada mulanya perjanjian ini adalah hanya pada ke 5 negara besar pemilik senjata nuklir agar tidak melakukan transfer teknologi senjata nuklir ke negara lain. Saat ini program itu juga bertujuan untuk pengurangan produksi dan penghancuran senjata nuklir.

Program pengayaan bahan bakar nuklir merupakan isu utama yang melatarbelakangi isu nuklir Iran saat ini, kemudian dikhawatirkan akan digunakan untuk produksi senjata berhulu ledak nuklir.

Pengayaan uranium dibagi menjadi dua pengertian yang pertama *Low Enriched Uranium (LEU)*, dimana kadar persentase pengayaan uraniumnya lebih


² <http://www.irib.com/worldservice/melayuRADIO/nuklir/resistensi.htm>

kecil dari 20 persen dan *Highly Enriched Uranium* (HEU), dengan persentasi pengayaannya lebih besar dari 20 persen. Meskipun dalam weapon grade atau pengayaan uranium untuk produksi senjata diperlukan lebih dari 90 persen, akan tetapi karena adanya potensi menggunakan lebih kecil grade-nya bisa digunakan untuk hulu ledak, maka untuk reactor grade dibatasi hanya dibawah 20 persen pengayaan.

Proses pengayaan uranium ini sebenarnya sudah dimiliki oleh beberapa negara yang mempunyai pembangkit nuklir untuk keperluan reactor grade, seperti Belanda, Jerman, Inggris, Rusia, dan Jepang. Secara prinsip teknologi ini bisa juga digunakan untuk mengembangkan weapon grade, dengan menggunakan metode gas centrifugal.

Meskipun Iran menyebutkan hanya untuk tujuan pembangkit listrik dan tidak akan diteruskan menjadi proyek senjata dengan meninggikan pengayaan uraniumnya, akan tetapi beberapa kalangan mensinyalir bahwa dengan *reactor grade* saja dapat diproses menjadi bom. Kekhawatiran tersebut pernah dibahas dalam satu konferensi internasional di Rusia. Pada saat itu, pegawai IAEA asal AS menjelaskan bahwa kita harus berhati-hati dengan reactor grade, senjata nuklir bisa diproses dari reaktor tersebut seperti yang terjadi di Korea Utara.

Faktor lain yang menyebabkan permasalahan ini menjadi kompleks adalah masa lalu Iran dengan AS dan isu Timur Tengah yang dikaitkan dengan Israel dan Palestina. Isu nuklir Iran ini menjadi serius, apabila masalah ini berlanjut pada rencana pengerahan militer, seperti kasus negara tetangga mereka Irak. Apabila



hal tersebut terjadi di tengah isu terorisme, akan dapat meningkatkan ketegangan khususnya di wilayah Timur Tengah sehingga akan menambah panjang terjadinya konflik perang.

Mengacu pada isu nuklir tersebut ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita seperti seberapa jauh hak pengembangan teknologi dan pemenuhan kebutuhan negeri dapat menjadi adil bagi semua pihak. Di sisi lain, bagaimana mengatur agar pemanfaatannya tidak disalahgunakan untuk pengembangan senjata.

Sesuai pasal keempat Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Iran berhak mendayagunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Lebih dari itu, negara-negara yang memiliki teknologi nuklir bahkan berkewajiban membantu negara-negara yang belum memiliki teknologi tersebut. Iran juga membayar iuran tahunan keanggotaan kepada IAEA dan oleh karenanya Teheran berhak memiliki dan mengembangkan teknologi nuklir sipil bukan untuk pembuatan senjata.³

Di luar konteks ketentuan internasional, terdapat konteks lain yang juga menuntut pemerintah Iran untuk memprioritaskan kepentingan nasional, yaitu konteks kedaulatan nasional dan independensi negara. Karena tak ada satu negara pun patut menyerahkan masalah keamanan dan kepentingan nasionalnya kepada pihak asing. Dan dalam konteks ini pula, masalah pendayagunaan teknologi nuklir menjadi sangat krusial bagi Iran ketika negara ini harus memenuhi kebutuhannya pada berbagai bidang ekonomi, sosial, dan iptek. Berdasarkan latar

³ <http://www.irib.com/worldservice/melayuRADIO/nuklir/resistensi.htm>

belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dan menuangkannya dalam suatu tulisan skripsi yang berjudul : "*Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Nuklir Iran*".

B. Batasan dan Rumusan Masalah

~~1. Batasan Masalah & Rumusan~~

Untuk memberikan kerangka penelitian dan pembahasan yang lebih jelas mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, maka penulis membatasi pembahasan dalam skripsi ini pada Kebijakan Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir Iran.

~~2. Rumusan Masalah~~

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1/3 masalah belakang kebijakan AS terhadap*
a. Apa kebijakan Amerika Serikat terhadap Nuklir Iran?
berupa kebijakan AS terhadap
b. Apa Penyebab Amerika Serikat memberikan kebijakan terhadap nuklir Iran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja kebijakan Amerika Serikat terhadap Nuklir Iran

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa penyebab Amerika Serikat memberikan kebijakan terhadap nuklir Iran

2. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan tersebut dapat tercapai, maka penelitian ini:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada penstudi Hubungan Internasional dan peminat masalah-masalah politik Internasional khususnya dalam kasus pengembangan nuklir Iran terkait dengan kebijakan Amerika Serikat.
- b. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan kepada penulis dalam upaya memahami segala fenomena Hubungan Internasional.

D. Kerangka Konseptual

Dalam uraian sistem internasional, *Holsti* menjelaskan bahwa negara merupakan aktor utama dalam hubungan global dan juga merupakan sumber motivasi utama dalam berbagai hubungan internasional.⁴ Karena itu sukarlah untuk disangkal bahwa hubungan internasional pada akhirnya merupakan forum interaksi dari berbagai kepentingan nasional. Setiap negara berusaha mempertahankan atau menegakkan kepentingan nasionalnya dalam forum masyarakat internasional melalui politik luar negeri yang dilaksanakan atau dipengaruhi oleh berbagai aparat pemerintah maupun berbagai kekuatan sosial

⁴ K. J. Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Analisis(ter)*, Jakarta, 1982, hal. 29

politik dalam negara. Dalam pelaksanaannya politik luar negeri tidaklah mempunyai ruang gerak yang tidak terbatas. Lagipula pelaksana politik luar negeri karena berbagai alasan tidak dapat menggunakan sembarang teknik dan instrumen untuk mencapai sasarannya.

Kepentingan nasional dengan demikian merupakan prinsip yang fundamental dalam politik luar negeri, sehingga pembicaraan mengenai politik luar negeri haruslah didahului dengan penjelasan mengenai kepentingan nasional. Menurut *Frankel*, kepentingan nasional adalah merupakan keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan suatu bangsa. Nilai itu merupakan tujuan yang umum dan langgeng, yang apabila dirumuskan akan mencerminkan konsensus nasional tentang pandangan hidup dari suatu bangsa. Meskipun demikian pandangan hidup itu menjadi relevan bagi politik luar negeri hanya setelah pandangan hidup tersebut dijabarkan sebagai sasaran yang pragmatis. Sasaran yang pragmatis dapat digariskan menurut bermacam-macam kategori; antara lain menurut spesifikasi sasaran, menurut sifatnya, menurut konstannya sasaran, dan menurut jangka waktu relevansinya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Preskriptif yaitu perpaduan tipe penelitian eksplanatif dengan tipe penelitian prediktif. Eksplanatif yaitu penggambaran dan menjelaskan fenomena-fenomena yang

terjadi serta kaitannya satu sama lain. Sedangkan prediktif dalam hal ini, penulis berusaha menggambarkan tentang prospek penyelesaian masalah pengembangan nuklir Iran.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan (*library research*). Dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, makalah, majalah, surat kabar, serta dari internet yang memuat data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun sumber-sumber yang menjadi tempat pengumpulan dan pengambilan data adalah Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin, *Center for Strategic and Internasional Studies* (CSIS) Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur-literatur yang memuat data dari sumber data lainnya, kemudian dikutip kembali dalam skripsi ini. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

- a. Kebijakan Pengembangan Nuklir Iran
- b. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Nuklir Iran
- c. Penyebab Amerika Serikat memberikan kebijakan terhadap nuklir Iran

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisa kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus statistik dan matematik, tapi menggambarkan persoalan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara menggabungkan fakta-fakta yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif memperkuat analisis kualitatif.

5. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah teknik penulisan yang menggunakan metode deduktif, yang dilakukan secara sistematis dan senantiasa berpatokan pada landasan konseptual. Metode deduktif yaitu membahas permasalahan dari masalah umum ke masalah yang bersifat khusus.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Politik Luar Negeri

Untuk membahas mengenai kebijakan politik luar negeri, maka terlebih dahulu saya ingin membedakan antara politik luar negeri dengan kebijakan politik luar negeri. Kedua konsep ini penting untuk dipahami terlebih dahulu karena terkadang kedua konsep ini digunakan secara bersamaan dalam suatu penulisan. Holsti melihat bahwa politik luar negeri sebagai output kebijakan luar negeri, Tindakan atau ide yang di rancang oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan suatu masalah atau melancarkan perubahan dalam lingkungan, yaitu kebijakan, sikap, atau tindakan suatu negara. Berdasarkan konsep diatas maka dapat dikatakan bahwa politik luar negeri yang dijalankan suatu negara tergantung pada kebijakan luar negerinya, atau dengan kata lain politik luar negeri adalah produk dari kebijakan luar negeri⁵

Berbeda dengan pengertian awalnya sebelumnya, Rossenau membedakan konsep politik luar negeri ke dalam tiga pengertian yaitu :

1. Politik luar negeri sebagai kumpulan orientasi.
2. Politik luar negeri sebagai jumlah komitmen terhadap suatu tindakan dan rencana bagi suatu tindakan dan rencana bagi suatu tindakan.

⁵ Holsti, 1988:135)

3. Politik luar negeri sebagai bentuk perilaku.⁶

Politik luar negeri sebagai kumpulan orientasi artinya adalah sejumlah cita-cita suatu bangsa yang diarahkan atau yang berhubungan dengan bangsa lain, sedangkan politik luar negeri sebagai sejumlah komitmen yang mengandung dimensi yang bersifat strategis. Artinya sebelum melakukan berbagai tindakan dalam forum Internasional maupun memberi respon terhadap berbagai tindakan dari negara lain, maka suatu negara harus memiliki sebuah rencana atau *platform* yang menjadi acuan seluruh pelaku politik luar negeri di negara tersebut. Sedangkan pengertian yang ketiga mengandung makna bahwa yang dimaksud politik luar negeri adalah berbagai tindakan dari suatu negara yang langsung berhubungan dengan negara lain.

Telah menjadi suatu hukum alam bahwa tidak ada suatu negara pun yang mampu bertahan tanpa berhubungan dengan negara lain. Dalam hal ini keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara akan dijadikan alasan dasar bagi pelaksanaan politik luar negeri. Sumber daya nasional atau yang sering disebut kekuatan nasional yang terbatas itulah yang menjadi alasan dilakukannya politik luar negeri. Kepentingan nasional itu sendiri timbul untuk menutupi kekurangan sumber daya itu, yang ternyata hanya biasa diperoleh diluar batas-batas teritorial negaranya, sebagai salah satu bidang kajian dalam hubungan internasional, politik luar negeri merupakan studi yang kompleks dan luas yang mencakup tidak kurang dari kehidupan internal dan kebutuhan

⁶ Bakri, 1999:44

kebutuhan eksternal dari sekelompok besar masyarakat dan memelihara identitas geografis, hukum dan sosialnya sebagai negara. Secara konseptual politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

Defenisi lain tentang politik luar negeri adalah menurut Lovel yang dikutip:

Politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik nasional untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk menetapkan tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai nilai (*Good Value*) yang terdapat dalam sistemnya.⁷

Dilihat dari perspektif sistem, Politik luar negeri juga tidak dapat dipisahkan dari politik dalam negeri. Politik luar negeri dan politik dalam negeri masing masing merupakan subsistem dari suatu negara, karenanya Politik luar negeri merupakan subunit analisis dari kajian Ilmu Politik.

Berdasarkan defenisi tersebut di atas, maka dapat dikatakan kalau politik luar negeri dengan kebijakan luar negeri memiliki tingkatan yang berbeda dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, tetapi karena keterbatasan penulis maka kedua istilah ini akan di gunakan secara terpisah sebagaimana yang di rumuskan oleh Rossenau.

⁷ Plano & Olton, 1999:3

Dalam pembahasan politik luar negeri ada tiga komponen penting yang tidak terpisahkan yaitu kepentingan nasional, kemampuan nasional (*nasional capability*) dan kondisi internasional yang melingkupinya dengan segala sifat yang dinamis. Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang paling populer di dalam mendeskripsikan, menjelaskan atau meramalkan perilaku politik luar negeri suatu negara. Ketiga komponen ini sangat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional dapat dilihat sebagai perjuangan antara berbagai pandangan dan preferensi yang bersifat subyektif, yaitu suatu perjuangan dimana kepentingan nasional merupakan hasil dan akibat politik, sehingga ada kalangan yang memandang kepentingan nasional sebagai suatu ilmu dan ada pula yang memandang bahwa kepentingan nasional itu sebagai seni.

Oleh sebab itu muncullah pemahaman baru tentang politik luar negeri melalui pemikir politik pada saat itu. Salah satu pemikir yang *concern* dalam mengkaji politik luar negeri yaitu:

Apa yang disebut sebagai kepentingan dan nilai inti digambarkannya sebagai jenis kepentingan yang untuk mencapainya kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan yang sebesar besarnya. Nilai dan kepentingan ini menurutnya lagi, biasanya dikemukakan dalam bentuk asas - asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang di terima masyarakat tanpa *reserve* atau sikap kritis.⁸

Dalam kamus Ilmu Hubungan Internasional kepentingan nasional (*nasional nterest*) adalah tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang

⁸ Holsti, 1988:212

memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi negara karena menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, kesejahteraan ekonomi.

Kepentingan nasional termasuk dalam visium dan diperjuangkan oleh suatu negara untuk dipergunakan dalam rangka ketertiban internasional. Konsep ini adalah buatan manusia dan dirumuskan oleh pemimpin pemimpin negara dan para ahli teori politik dan dipatuhi oleh masyarakat karena disangkutkan kepada situasi sosial dan mencerminkan adanya nilai-nilai, ideologi, kepentingan golongan dan kepentingan perumusanya.

Konsep kepentingan nasional adalah berbeda dengan tujuan nasional. Pada umumnya berjangka panjang, lebih mendasar dan luas cakupannya, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Misalnya tujuan nasional mensejahterakan bangsa, dan peningkatan taraf hidup rakyatnya, lebih spesifik terbatas cakupannya atau terbatas cakupannya atau terbatas pada program tertentu, cenderung praktis (tidak filosofis) dan mudah berubah sesuai dengan tuntutan zaman atau persepsi mayoritas rakyat yang berbeda dengan politik internasional.

Untuk itulah dalam perumusan kebijakan luar negeri akan sangat bersifat kompleks dan variabel-variabel yang mempengaruhinya sangat banyak pula, untuk itu pada bagian selanjutnya akan di bahas tentang perumusan politik luar

negeri. Defenisi lainnya tentang politik luar negeri adalah menurut Yusuf yaitu politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik nasional untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk menetapkan tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai nilai (*good Values*) yang terdapat dalam sistemnya.

Holsti menyatakan pendapatnya mengenai politik luar negeri bahwa :

Politik luar negeri sebagai output kebijakan luar negeri, tindakan atau ide yang dirancang oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan suatu masalah serta melancarkan perubahan dalam lingkungan yaitu kebijakan sikap atau tindakan suatu negara.⁹

B. Kepentingan Nasional

Dalam sistem internasional, pola interaksi yang terjadi diantara negara-negara pada umumnya dilandasi oleh adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap negara. Kepentingan nasional suatu bangsa muncul dalam pergaulannya dengan bangsa-bangsa dan negara-negara baik secara bilateral maupun multilateral dalam ruang lingkup regional dan global.

Setiap negara tidak bisa menghindar dari konsep kepentingan nasional Karena konsep tersebut berkaitan erat dengan tujuan-tujuan nasional. Dalam hal ini jelas bahwa kepentingan nasional selalu menjadi landasan bagi suatu bangsa dan negara dalam menyusun kebijaksanaan dan strategi yang dipakai dalam pergaulannya dengan berbagai bangsa dan negara lain di arena internasional. Kepentingan nasional diakui sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri.

⁹ Holsti, 1988: 121

Dalam kepentingan nasional terkandung dalam apa yang menjadi cita-cita atau tujuan nasional suatu bangsa dan negara. Tujuan nasional tersebut antara lain mengandung keinginan untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa dan wilayah (tanah, laut, dan udara/ angkasa) serta memanfaatkan sendiri segala yang terkandung di dalamnya (seperti kekayaan alam, penduduk, dan makna strategisnya) untuk kesejahteraan bangsa. Tujuan nasional itu biasanya juga mengandung kegiatan untuk menentukan sendiri pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berbagai aspeknya seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya suatu negara berusaha melindungi dan mempertahankannya dari pihak lain yang dapat mengancam kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan negaranya. Mengenai hal ini Mas'ood berpendapat bahwa .

Kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan-gangguan negara lain.¹⁰

Dari tirjauan di atas dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional selalu berkaitan erat dengan keamanan, kesejahteraan, dan juga power. Bertemu kepentingan dari berbagai negara merupakan sumber terjadinya hubungan kolaborasi dan akan bertahan lama apabila setiap negara yang terlibat memiliki kemauan yang kuat serta memutuskan bersedia untuk bertindak berdasarkan kepentingan bersama mereka. Diharapkan dengan berkolaborasi maka permasalahan yang timbul dapat diselesaikan melalui perundingan.

¹⁰ Mas'ood (1990: 141)

Para pemimpin negara dapat merumuskan kebijakan-kebijakan luar negerinya terhadap negara lain, baik itu kebijakan yang bersifat kooperatif atau kerjasama, maupun kebijakan yang bersifat paksaan sebab adanya perselisihan-perselisihan internasional, mengakibatkan konsekuensi dari kepentingan nasional antar bangsa dapat saling berbenturan. Kenyataan ini sama dengan yang dikemukakan oleh Nuechterlein yang menggambarkan kepentingan nasional sebagai produk dari suatu proses politik melalui pemimpin dari suatu negara yang tiba pada suatu keputusan tentang pentingnya suatu peristiwa luar terhadap keadaan negerinya.¹¹ Apa yang hendak digambarkan oleh Nuechterlein di sini adalah bagaimana suatu peristiwa, dalam hal ini kejadian-kejadian yang menimpa negara lain, atau sikap-sikap serta tindakan dari negara lain turut mempengaruhi proses kebijakan luar negeri suatu negara. Manakala kepentingan mereka berlangsung harmonis, maka negara-negara tersebut kerap kali bertindak untuk menanggulangi masalah yang dihadapi bersama-sama. Namun, jika terjadi pertentangan kepentingan-kepentingan, ialahlah persaingan, permusuhan, ketegangan, yang pada akhirnya dapat menyulut perang. Meskipun begitu dalam keputusan dan tindakan politik luar negeri terdapat sebuah hubungan antara kepentingan nasional dengan sasaran berbagai penjabaran dari kepentingan nasional.

¹¹ Sunardi, 1985: 3

Kadang terjadi disparitas (perbedaan) antara statement-statement tentang nilai dan prinsip yang dianut disatu pihak dengan politik praktis di pihak lain. Disparitas muncul karena dalam merancang sasaran didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kepentingan praktis. Karena itu suatu negara dalam menuangkan kepentingan nasionalnya ke dalam suatu kebijakan politik luar negerinya harus mampu melihat dan menyesuaikan kepentingan nasionalnya dengan kondisi domestik regional maupun kondisi global yang melingkupinya.

Kepentingan nasional melukiskan aspirasi negara dan untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya diperlukan kebijaksanaan, keputusan dan rencana dalam aplikasinya agar dapat menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai melalui berbagai tindakan yang menunjukkan adanya kebutuhan, keinginan, dan tujuan. Kepentingan nasional juga erat kaitannya dengan masalah keamanan, integritas, dan posisi negara melalui perimbangan kekuatan. Karena dalam rangka perwujudan stabilitas dan ketertiban internasional. Yusuf menjelaskan mengenai kepentingan nasional "Kepentingan nasional termasuk dalam visium dan perjuangan oleh suatu bangsa atau negara untuk dipergunakan dalam rangka ketertiban internasional"¹²

Kapan dan bagaimana suatu negara mencapai kepentingan tersebut sangatlah tergantung pada skala prioritas dan kapabilitas negara tersebut untuk mencapainya. Mengenai power, Morgenthau menyamakan kepentingan nasional dengan usaha negara untuk mengerjakan power dimana power negara dipandang

¹² Yusuf, 1989: 77

sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memelihara maupun mengembangkan kontrol suatu negara terhadap negara lain. Oleh karena itu menurut Morgenthau strategi diplomasi harus dimotivasi oleh kepentingan nasional.

Diplomasi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri dijadikan alat dan metode untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi membantu perumusan politik luar negeri dengan berbagai cara diantaranya menyebarluaskan kebijaksanaan, mencoba menjelaskan kebijaksanaan tersebut, merundingkan atau menegosiasikan persetujuan-persetujuan yang menjamin keamanan negara baik dalam perang maupun damai. Diplomasi dapat menciptakan kesesuaian dan mendamaikan perbedaan-perbedaan antara negara-negara. Negara-negara dalam mengejar tujuan yang erat berkaitan dengan kepentingan nasional masing-masing, tidak jarang terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan bahkan kadang-kadang terjadi bentrokan-bentrokan kepentingan. Secara umum fungsi utama diplomasi adalah melakukan negosiasi.

Berangkat dari sasaran jangka pendek, permasalahan pengembangan nuklir Iran yang dilarang oleh Amerika Serikat merupakan persoalan yang harus diselesaikan dengan segera guna pencapaian kepentingan nasional masing-masing Negara dalam interaksi internasional.

C. Konsep NPT

Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian besar negara berdaulat (187 negara) mengikuti perjanjian ini, walaupun dua di antara tujuh negara yang memiliki senjata nuklir dan satu negara yang mungkin memiliki senjata nuklir belum meratifikasi perjanjian ini. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat.¹³

Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu nonproliferasi, pelucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

1. Pokok Pertama : Non-Proliferasi

Terdapat 5 negara yang diperbolehkan oleh NPT untuk memiliki senjata nuklir: Perancis (masuk tahun 1992), Republik Rakyat Tiongkok (1992), Uni Soviet (1968, kewajiban dan haknya diteruskan oleh Rusia), Britania Raya (1968), Amerika Serikat (1968).

Hanya lima negara ini yang memiliki senjata nuklir saat perjanjian ini mulai dibuka, dan juga termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Lima negara pemilik senjata nuklir (*Nuclear Weapon States/NWS*) ini setuju

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Nuklir

untuk tidak mentransfer teknologi senjata nuklir maupun hulu ledak nuklir ke negara lain, dan negara-negara non-NWS setuju untuk tidak meneliti atau mengembangkan senjata nuklir.

Kelima negara NWS telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-NWS, kecuali untuk merespon serangan nuklir atau serangan konvensional yang bersekutu dengan negara NWS. Namun, persetujuan ini belum secara formal dimasukkan dalam perjanjian, dan kepastian-kepastian mengenainya berubah-ubah sepanjang waktu. Amerika Serikat telah mengindikasikan bahwa mereka akan dapat menggunakan senjata nuklir untuk membalas penyerangan non-konvensional yang dilakukan oleh negara-negara yang mereka anggap "berbahaya". Mantan Menteri Pertahanan Inggris, Geoff Hoon, juga telah menyatakan secara eksplisit mengenai kemungkinan digunakannya senjata nuklir untuk membalas serangan seperti itu. Pada Januari 2006, Presiden Perancis, Jacques Chirac menerangkan bahwa sebuah serangan teroris ke Perancis, jika didalangi oleh sebuah negara, akan memicu pembalasan nuklir (dalam skala kecil) yang diarahkan ke pusat kekuatan "negara-negara berbahaya" tersebut.

2. Pokok Kedua : Perlucutan

Pasal VI dan Pembukaan perjanjian menerangkan bahwa negara-negara NWS berusaha mencapai rencana untuk mengurangi dan membekukan simpanan mereka. Pasal VI juga menyatakan "Perjanjian dalam perlucutan umum dan lengkap di bawah kendali internasional yang tegas dan efektif."

Dalam Pasal I, negara-negara pemilik senjata nuklir (NWS) menyatakan untuk tidak "membujuk negara non-Nuklir manapun untuk mendapatkan senjata nuklir." Doktrin serangan pre-emptive dan bentuk ancaman lainnya bisa dianggap sebagai bujukan / godaan oleh negara-negara non-NWS. Pasal X menyatakan bahwa negara manapun dapat mundur dari perjanjian jika mereka merasakan adanya "hal-hal aneh", contohnya ancaman, yang memaksa mereka keluar.

3. Pokok Ketiga : Hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

Karena sangat sedikit dari negara-negara NWS dan negara-negara pengguna energi nuklir yang mau benar-benar membuang kepemilikan bahan bakar nuklir, pokok ketiga dari perjanjian ini memberikan negara-negara lainnya kemungkinan untuk melakukan hal yang sama, namun dalam kondisi-kondisi tertentu yang membuatnya tidak mungkin mengembangkan senjata nuklir.

Bagi beberapa negara, pokok ketiga perjanjian ini, yang memperbolehkan penambangan uranium dengan alasan bahan bakar, merupakan sebuah keuntungan. Namun perjanjian ini juga memberikan hak pada setiap negara untuk menggunakan tenaga nuklir untuk kepentingan damai, dan karena populernya pembangkit tenaga nuklir yang menggunakan bahan bakar uranium, maka perjanjian ini juga menyatakan bahwa pengembangan uranium maupun perdagangannya di pasar internasional diperbolehkan. Pengembangan uranium

secara damai dapat dianggap sebagai awal pengembangan hulu ledak nuklir, dan ini dapat dilakukan dengan cara keluar dari NPT. Tidak ada negara yang diketahui telah berhasil mengembangkan senjata nuklir secara rahasia, jika dalam pengawasan NPT.

Negara-negara yang telah menandatangani perjanjian ini sebagai negara non-senjata nuklir dan mempertahankan status tersebut memiliki catatan baik untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Di beberapa wilayah, fakta bahwa negara-negara tetangga bebas dari senjata nuklir mengurangi tekanan bagi negara tersebut untuk mengembangkan senjata nuklir sendiri, biarpun negara tetangga tersebut diketahui memiliki program tenaga nuklir damai yang bisa memicu kecurigaan. Dalam hal ini, perjanjian Non-Proliferasi bekerja sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB III
GAMBARAN UMUM
PROGRAM NUKLIR IRAN

A. Profil Nuklir Iran

Denyut aktivitas nuklir Iran berawal sejak masa pra revolusi Islam. Tahun 1956, negeri Persepolis ini mengesahkan pendirian Pusat Atom Universitas Teheran yang kemudian disusul dengan terjalannya perjanjian perdana antara Iran dan Amerika Serikat untuk kerjasama nuklir. 11 tahun kemudian, Amerika Serikat mengoperasikan sebuah reaktor berkapasitas 5 megawatt untuk riset dan kegiatan akademi Universitas Tehran. Namun begitu, dalam pendirian reaktor itu Amerika Serikat menerapkan limitasi ekstra ketat pada mekanisme keterlibatan dan kerjasama para teknisi Iran. Amerika Serikat sama sekali tidak memperkenankan para teknisi Iran yang tidak menguasai teknologi ini terlibat dalam penginstalan dan pengoperasian reaktor.

Setelah itu, Iran membangun empat reaktor nuklir untuk riset dengan masing-masing memiliki kekuatan tidak lebih dari 30 kilowatt yang terletak di pusat riset nuklir Asfahan. Pada tahun 1975, Iran menandatangani transaksi pembangunan reaktor nuklir dengan perusahaan Jerman Barat, Siemen. Seharusnya sesuai dengan transaksi itu, perusahaan Jerman tersebut mendirikan dua reaktor nuklir dengan kekuatan masing-masing 1.300 megawatt di Kota Busheher yang terletak di tepi Laut Persia.

Pada saat yang sama, pemerintah Iran meminta Perancis juga mendirikan sebuah reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan 935 megawatt. Perusahaan Perancis tersebut seharusnya telah membangun reaktor nuklir itu di kawasan Ahwaz, yang tak jauh dengan perbatasan Irak. Iran juga menandatangani transaksi dengan perusahaan Perancis yang lain lagi untuk mendirikan sebuah reaktor nuklir dengan uranium berkadar rendah. Pemerintah Perancis pada 7 Oktober 1976 menyatakan niatnya melaksanakan pembangunan delapan reaktor nuklir di Iran.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk reaktor nuklir itu, Pemerintah Iran mengirim para ilmuwan dan teknisi ke beberapa universitas dan lembaga-lembaga riset nuklir di Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat juga mendirikan reaktor nuklir berskala kecil untuk riset dekat Kota Teheran. Pemerintah Iran memasok uranium dalam jumlah besar untuk kebutuhan reaktor nuklir tersebut.

Ketika rezim Shah Iran jatuh pada tahun 1979, Amerika Serikat berhenti memasok uranium untuk Iran. Sebuah harian Israel Yediot Aharonot edisi 15 November 1991 mengungkapkan, Iran hanya membutuhkan beberapa kilogram saja dari bahan uranium untuk membuat sebuah senjata nuklir. Sementara tatkala rezim Shah Iran jatuh, salah satu dari dua reaktor nuklir yang dibangun pemerintah Jerman telah rampung sekitar 80 persen, sedangkan reaktor nuklir lainnya yang

dibangun Jerman baru selesai 50 persen. Pemerintah Jerman lalu melarang perusahaan Jerman itu melanjutkan proyek pembangunan dua reaktor nuklir tersebut.

Reaktor-reaktor nuklir yang dibangun Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman itu merupakan proyek ambisius Shah Iran untuk membangun 20 reaktor nuklir dengan berbagai macam tujuan, yakni untuk pembangkit tenaga listrik, riset, dan keperluan lainnya dengan biaya sekitar 30 miliar dollar Amerika Serikat.

Pada masa perang Irak-Iran, Pemerintah Iran mengundang ilmuwan nuklir Iran yang berada di luar negeri untuk ikut serta dalam sebuah konferensi tentang nuklir yang digelar di Kota Busheher tempat beradanya dua reaktor nuklir yang dibangun Jerman-pada bulan Maret 1986. Pesawat-pesawat tempur Irak beberapa kali membombardir dua reaktor nuklir Iran itu yang menyebabkan terjadinya kehancuran pada bagian-bagian penting reaktor nuklir tersebut. Dalam gempuran pesawat tempur Irak itu, seorang ahli nuklir asal Jerman yang bekerja di reaktor nuklir Iran itu tewas.

Sebuah harian Jerman mengungkapkan, perusahaan Jerman itu terus melanjutkan proyek pembangunan nuklir Iran bekerja sama dengan perusahaan Argentina. Sebuah harian Argentina juga mengungkapkan, perusahaan Argentina melanjutkan proyek yang sebelumnya dilakukan perusahaan Amerika Serikat untuk riset nuklir dekat Kota Teheran, dengan menggunakan uranium berkadar

rendah yang tidak layak untuk membuat sebuah bom atom. Meski demikian, dinas intelijen Amerika Serikat (CIA) dan Israel (Mossad) sengaja menyuplai informasi pada media massa Barat dan Israel bahwa Iran berusaha memiliki senjata nuklir. CIA dan Mossad menuduh Iran membangun reaktor nuklir berskala kecil dengan kekuatan masing-masing 10 hingga 30 megawatt¹⁴.

Sementara setiap reaktor nuklir tersebut, yang bekerja dengan uranium dan air, bisa mampu memproduksi 2,5-3 kilogram plutonium setiap tahunnya. Dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun, reaktor nuklir dengan kapasitas semacam itu diperkirakan bisa memproduksi sebuah senjata atom. Latar belakang itulah menurut CIA dan Mossad dibalik Iran terus berupaya mendekati Cina, Pakistan, dan negara Asia Tengah dalam upaya membangun laboratorium nuklir berskala kecil untuk kebutuhan riset ilmiah. Pada 30 Oktober 1991, Iran disinyalir membeli bahan dari Cina yang dapat memproduksi uranium. Majalah Time edisi 16 Desember 1991 mengungkapkan, Cina telah menjual kepada Iran laboratorium kecil untuk produksi plutonium dan juga telah menjual teknologi canggih untuk operasi sinar laser bagi pengelolaan uranium 235, yang cukup untuk produksi senjata nuklir.

Amerika Serikat juga mengungkapkan kecemasannya atas penandatanganan hubungan ekonomi Iran-Rusia tahun 1991, yang menyebutkan Rusia akan membantu membangun dua reaktor nuklir yang masing-masing punya

¹⁴ <http://kompas.com/kompas-cetak/0306/26/ln/379597.htm>

kekuatan 440 megawatt. Sejak kesepakatan Iran-Rusia tahun 1991 itu, Amerika Serikat tidak henti-hentinya menekan Rusia agar membatalkan kesepakatan tersebut. Pada tahun 1995, Amerika Serikat berhasil menekan Rusia mengurungkan niatnya melanjutkan pembangunan dua reaktor nuklir Iran itu dengan imbalan Rusia bisa terus menjual senjata konvensional pada Iran hingga tahun 1999.

Namun, pada tahun 2000, Rusia secara mengejutkan membatalkan perjanjian dengan Amerika Serikat dan berniat terus melanjutkan kerja sama nuklir dengan Iran. Kunjungan Presiden Muhammad Khatami ke Rusia pada bulan Maret 2001 menghasilkan kesepakatan memperluas kerja sama nuklir. Dalam waktu yang sama, Iran mengumumkan berniat menyediakan dana 32 miliar dollar US untuk pengembangan militer selama lima tahun mendatang. Kementerian Energi Rusia tahun 2002 secara mengejutkan mengumumkan perencanaan selama 10 tahun, hingga tahun 2012, yang salah satu isinya menegaskan kesediaan Rusia membangun reaktor nuklir baru Iran. Pengumuman Kementerian Energi Rusia itu dinilai titik balik hubungan kerja sama nuklir Iran-Rusia, yang selama ini hanya terbatas pada reaktor nuklir Busheher yang sudah berlangsung 10 tahun terakhir ini.

B. Kebijakan Nuklir Iran

Ketertarikan Iran pada upaya mengembangkan nuklir sudah berlangsung sejak tahun 1957. Pada masa itu, hubungan Amerika Serikat dan Iran yang berada di bawah pemerintahan Shah Reza Pahlevi sangatlah mesra yang ditandai dengan perjanjian kerja sama nuklir sipil sebagai bagian dari program *Atom for Peace US*. Lewat perjanjian ini, Amerika Serikat menyediakan bantuan teknis, menyediakan bantuan pengayaan uranium dan kerja sama penelitian penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.

Tahun 1968, Iran menandatangani perjanjian nonproliferasi (NPT) dan sejak itu pulalah Iran mengklaim memiliki hak mutlak (*unalienable right*) menggunakan dan mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai¹⁵. Tentu saja pandangan Iran mengacu atas dasar kebutuhan dan keinginan pengembangan teknologi. Di samping itu, ada keyakinan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk mengembangkan teknologi tanpa intervensi negara lain. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi negara di mana nuklir bisa menjadi salah satu alternatif sumber energi. Sebagai negara merdeka, Iran berhak mempunyai kebijakan untuk mengembangkan program nuklir, apalagi Iran juga punya kemampuan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang baik.

¹⁵ <http://www.irib.com/worldservice/melayuRADIO/nuklir/resistensi.htm>

Sejak revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 sampai pada pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad Iran telah menjadi kekuatan regional di Timur Tengah. Didorong oleh pendapatan dari minyak, Iran telah membuat kemajuan-kemajuan teknologi belum lama ini, termasuk pengembangan sebuah satelit. Keteguhan Iran yang nyata untuk menjadi sebuah kekuatan besar di Timur Tengah, dan sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan pada tingkat global, telah semakin jelas dengan permainan perangnya belum lama ini, di mana ia memamerkan teknologi militer baru, seperti misil jarak jauh dan torpedo yang dapat mengelakkan sonar.

Dari berbagai kebijakan luar negeri Iran yang dikeluarkan, salah satu kebijakan yang mendapat sorotan dunia internasional adalah kebijakan melanjutkan program nuklirnya. Segera setelah terpilih menjadi presiden, Mahmoud Ahmadinejad menyatakan niatnya untuk melanjutkan kembali program nuklirnya yang sempat terhenti. Kebijakan Mahmud Ahmadinejad ini sangat mengagetkan Amerika Serikat.

Kebijakan politik luar negeri Iran untuk melanjutkan program nuklirnya, sangat berimbang pada keadaan politik internasional. Setelah membahas mengenai hubungan dengan Amerika Serikat yang semakin menegang, Iran telah berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa Negara tentang program nuklirnya. Program nuklir ini digunakan pemerintah Ahmadinejad untuk memberikan gambaran pada dunia bahwa ada ketidakadilan yang terjadi di dunia ini yang disebabkan oleh

Negara-negara ad kuasa yang sering memaksakan kehendak mereka kepada Negara-negara yang tidak berdaya.

Sehubungan dengan ketidakadilan yang dihembuskan oleh Presiden Ahmadinejad ini, ia juga berhasil membangun sebuah hubungan bilateral dengan pemerintah Venezuela dan Bolivia. Kedua pemerintahan ini dikenal sangat anti terhadap pemerintahan Bush. Maka tak heran apabila Ahmadinejad mendapatkan dukungan dari kedua Negara ini untuk melanjutkan program nuklirnya. Negara-negara ini memperlihatkan visi yang sama tentang pemerintah Amerika Serikat. Penjalinan hubungan kerjasama Negara-negara ini adalah sebuah bentuk pernyataan bahwa mereka berusaha membangun sebuah aliansi untuk membendung kekuatan hegemoni barat dan dalam hal ini Amerika Serikat.

Masih berhubungan dengan program nuklirnya, Presiden Ahmadinejad pernah mengatakan bahwa kebijakan melanjutkan program nuklir Iran begitu pentingnya di mata dunia sehingga dapat mengubah seluruh tatanan diplomatic internasional yang ada. Ia menjelaskan, keberhasilan Iran dibidang teknologi nuklir bukan hanya sebuah prestasi luar biasa bagi bangsa Iran melainkan merupakan sebuah kebanggaan bagi Negara-negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, Arab dan Negara-negara Islam.

Iran dibawah pemerintahan Ahmadinejad menggunakan isu program nuklirnya sebagai alat untuk mencari dukungan dikaitkan dengan adanya

ketidakadilan yang terjadi di dunia internasional. Iran berusaha mencari dukungan dengan pernyataan presiden Ahmadinejad tersebut, bahwa nuklir Iran adalah sebuah kebanggaan beberapa Negara-negara tadi. Iran berusaha membangun kekuatan melalui opini regional. Bahwa selama ini hanya Amerika Serikat dan Negara yang dekat dengan Amerika sajalah yang dapat memproduksi dan menikmati program nuklir. Sedangkan Negara-negara yang berada dikawasan timur atau Negara-negara dianggap sebagai musuh Amerika atau Barat akan mendapat tekanan dan larangan untuk mengembangkan program nuklir.

Usaha Iran untuk mencari dukungan dan juga menerapkan politik luar negerinya berkaitan dengan isu nuklirnya, yakni mencoba merabangun kerja sama yang lebih luas. Iran saat ini sangat gencar melakukan kerja sama dengan Negara-negara yang notabene adalah Negara-negara yang sering memberikan pernyataan atau aksi-aksi kontroversial melawan hegemoni Amerika Serikat di dunia internasional. Selain menjalin kerja sama dengan Venezuela dan Bolivia, Iran kini sudah mulai menjalin hubungan baik dengan Kuba. Kuba merupakan salah satu Negara sosialis yang secara terang-terangan mendukung program nuklir Iran yang untuk tujuan damai. Dan sebaliknya Kuba mengkritik Negara-negara yang mendukung pemberian sanksi terhadap Iran, terutama Amerika Serikat. Seperti yang dikatakan oleh menteri luar negeri Kuba sendiri, Perez Rouge ketika menerima kunjungan Menteri luar negeri Iran Manoucher Mottaki di Havana Kuba. Pemerintah Kuba mengatakan bahwa rakyat Kuba secara tegas menentang sejumlah

Negara yang menekan Iran agar menghentikan pengayaan uraniumnya. Pemerintah Kuba melalui menlunya mengatakan bahwa Amerika Serikat lebih baik melucuti persenjataan nuklirnya sendiri daripada mengurus nuklir Iran yang dibangun untuk tujuan damai.

Apa yang menjadi dampak kebijakan pengembangan nuklir Iran saat ini begitu nyata. Iran berkembang menjadi sebuah Negara yang berpengaruh secara regional maupun internasional saat ini. Dengan ketijakan nuklirnya dan juga berbagai pencapaian dalam negerinya telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perpolitikan internasional. Dalam hal ini Iran berhasil memainkan bargaining position yang cukup besar. Iran memiliki posisi tawar yang sangat kuat sebagai Negara di kawasan timur. Selain itu pula Iran mampu memperlihatkan pada dunia bahwa Iran mampu bekerja sama dengan Negara-negara di dunia. Iran menginginkan dunia berjalan dengan adil karena mereka melihat sebuah ketimpangan dalam perpolitikan internasional yang didominasi oleh Barat. Iran yang terus melanjutkan kebijakan program nuklirnya mendapat kecaman dari dunia internasional. Tetapi Negara-negara yang turut memberikan kecaman tentunya Negara-negara yang tidak menyukai perkembangan yang dicapai Bangsa Iran. Dalam menghadapi tekanan dunia internasional pemerintah Iran mencoba melakukan pendekatan dimana-mana. Negara-negara yang didekati diantaranya adalah negara di kawasan Amerika Selatan.

Pemerintah Iran terus menupayakan setiap kebijakan-kebijakan luar negerinya secara aktif, agar dapat memberikan dampak atau pengaruh yang besar pada usaha bangsa Iran untuk menjadi sebuah Negara yang mandiri, berwibawa serta berubah menjadi sebuah Negara yang berpengaruh dan disegani serta menjadi inspirasi dikawasan timur tengah maupun di dunia internasional. Seperti yang pernah dikatakan Presiden Ahmadinejad bahwa Iran telah mampu merubah tataran politik dunia internasional dengan melanjutkan kebijakan nuklirnya. Ahmadinejad juga mengatakan dengan usaha untuk melanjutkan program nuklirnya tersebut maka bangsa Iran akan membuat bansa lain yang memiliki program nuklir yang tidak bersahabat dengan Iran akan mengakui hak Iran untuk melakukan program nuklirnya.

Kini, teknologi nuklir Iran untuk pembangkit listrik di-support oleh Rusia. Rusia dan Iran menjalin kerja sama strategis. Nilai kontraknya diperkirakan senilai 25 Miliar Dollar AS. Rusia membutuhkan Iran sebagai partner strategis untuk mengimbangi upaya dominasi AS di kawasan Eurasia (Eropa-Asia). Sementara Iran membutuhkan teknologi Rusia untuk agar nanti Iran menjadi pusat geopolitik-ekonomi di Timur Tengah. Dalam intelijen internasional, kawasan Eurasia memang merupakan target dominasi AS. Kegelisahan AS dan Sekutunya pun menjadi-jadi. Selain teknologi nuklir, Rusia ternyata juga mentransfer teknologi militer dan ruang angkasa ke Iran.

Kini, Rusia seperti "mengkhianati" Iran. Rusia lewat IAEA, mendukung resolusi PBB. Iran menilai sikap Rusia ambigu. Padahal Rusia sebenarnya mengkhawatirkan serangan AS ke Iran benar-benar akan terjadi. Sikap AS yang kelewatan sebenarnya tak seharusnya terjadi; karena nafsu. Yang patut ditiru adalah sikap Perancis, Jerman, dan Inggris yang menjanjikan pengiriman bantuan dan kerja sama teknis kepada Iran untuk pembangunan reaktor nuklir sipil (listrik), demi transparansi nuklir. Sikap negara-negara tersebut bijaksana ketimbang kekhawatiran yang membabi buta atas sikap pemerintah Iran.

Lepas dari fakta tersebut, sebenarnya ada apa di balik sikap Iran yang "ngotot" untuk program nuklir sipilnya? Berdasarkan analisis, terdapat dua hal yang mendasari, yakni: antisipasi konsumsi energi listrik dalam negeri Iran yang makin tinggi, dan geopolitik kebutuhan energi listrik kawasan¹⁶.

1. Antisipasi konsumsi energi listrik Iran.

Menurut EIA, kebutuhan listrik domestik Iran makin tinggi, dan dibutuhkan investasi miliaran Dollar Amerika. Pada tahun 2004, kapasitas terpasang di Iran sebesar 34,3 GW. Produksi listrik sebesar 155,7 miliar KWH. Konsumsi listriknya 145,1 miliar KWH. Pada tahun 2004, kapasitas terpasang Iran naik menjadi sebesar 36 GW. Pertumbuhan konsumsi listriknya mencapai 7-9 persen. Pemerintahan Iran mau tak mau harus mengejar

¹⁶ <http://indonesian.irib.ir/POLITIK/2005/agustus05/rahbar.htm>

keamanan pasokan listrik domestik apalagi jumlah penduduk Iran diperkirakan mencapai 100 juta orang pada tahun 2025.

Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, Iran membutuhkan daya listrik 70.000 MW pada tahun 2021. Jika daya listrik tersebut dihasilkan dari minyak (BBM), dibutuhkan 112-140 juta barrel per tahun. Ini sebuah dilema untuk Iran. Pembangkit listrik besar Iran kebanyakan berbahan baku BBM. Padahal pendapatan Iran 80 persen berasal dari ekspor minyak, dan 45 persennya digunakan untuk APBN Iran. Selain itu, hasil produksi minyak Iran belum ada kemajuan pesat akibat konsumsi domestik yang naik 280 persen sejak tahun 1978, dan belum pula dibutuhkan biaya 40 miliar USD untuk perawatan kilang-kilang minyak Iran dalam 15 tahun. Jika situasi terus seperti itu, Iran diprediksi menjadi *net oil importer* pada tahun 2010. Oleh karena itu Iran berniat mengembangkan program nuklirnya.

Bagaimana dengan pembangkit listrik berbahan baku gas? Jika Iran mengembangkan dan meningkatkan pembangunan pembangkit listrik berbahan baku gas, sangat percuma. Menurut *Massachusetts Institute of Technology* (AS) sendiri, biaya produksi listrik dari gas berbanding sama dengan biaya produksi listrik dari reaktor nuklir. Selain itu, dilema Iran, Eropa, dan Asia yang lain adalah gas Iran termasuk yang sangat dibutuhkan untuk memasok kebutuhan Eropa dan Asia.

Sungguh tak masuk akal jika Iran harus mengikuti kemauan AS untuk menghentikan pengayaan uranium demi listrik Iran. Iran memang kaya akan minyak dan gas, tapi tetap membutuhkan sumber energi alternatif untuk listrik. Inggris, Canada, hingga Rusia adalah eksportir migas, tapi negara-negara ini tetap menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Di dunia saat ini, 19 persen daya listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Penggunaan reaktor nuklir di dunia sebagai penghasil daya listrik diperkirakan akan meningkat terus. Yang jelas, Iran telah merencanakan sumber pasokan energi listrik pada tahun 2021 berasal dari 10 persen tenaga nuklir, 20 persen dari hydro (tenaga air), 60 persen dari gas, dan sisanya dari yang lain.

2. Geopolitik kebutuhan energi listrik kawasan.

Seerti diketahui bersama, letak Iran yang sangat strategis membuat posisi Iran dekat dengan negara-negara Asia Selatan, Asia Tengah, ataupun Laut Caspia. Beberapa negara di kawasan tersebut kekurangan pasokan listrik untuk dalam negerinya. Sebut saja seperti negara-negara seperti Syria, Georgia, Azerbaijan, Afghanistan, Irak, Pakistan, hingga India.

Tapi, negara-negara yang minim pasokan daya listriknya mau tak mau harus bersyukur, karena jaringan interkoneksi telah dibangun dan sedang dikembangkan lagi menghubungkan antar-negara di kawasan Asia Tengah dan Asia Selatan. Kabar baiknya jaringan interkoneksi ini menyambung hingga ke

daratan Eropa; dari Iran melalui Armenia. Iran yang kaya akan minyak dan gas melihat peluang bisnis energi listrik kawasan. Tercatat, sejak tahun 1992, Iran mulai menjual daya listriknya ke negara-negara tetangga.

Ambisi Iran untuk mempengaruhi negara-negara kawasan lewat penjualan listrik, sepertinya seimbang dengan rencana Iran yang akan membangun reaktor nuklir untuk pembangkit listrik, walaupun juga untuk kebutuhan domestik Iran juga. Iran masih berencana memperluas pasar penjualan daya listriknya ke negara-negara tetangga.

Selain mencari pasar penjualan, Iran bersama Rusia, dan China termasuk concern berinvestasi pembangunan pembangkit listrik di Asia Tengah. Selain sebagai perluasan pengaruh geopolitik, juga untuk memasok kebutuhan energinya sendiri (seperti ke China). Tiga negara ini mendorong negara Asia Tengah untuk menjual ke luar negara bersangkutan. Tiga negara ini terlibat pendanaan pembangunan di negara-negara seperti Tajikistan dan Kazakhstan. Tercatat, tidak ada perusahaan asal AS satu pun yang terlibat di pengembangan pembangkit listrik di Asia Tengah.

Bisnis energi listrik Iran, Rusia, dan China bisa jadi membuat gerah AS. Secara geopolitik energi, gerakan tiga serangkai secara tidak langsung akan membuat negara-negara Asia Tengah ataupun Asia Selatan akan tergantung pada mereka tersebut, dan mengurangi pengaruh dominasi AS.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Nuklir Iran

1. Sanksi Ekonomi

Amerika Serikat yang merasa khawatir dengan kemampuan yang dicapai Iran saat ini dalam hal pengayaan uranium, tidak tinggal diam. Setelah tidak mampu mengubah keputusan bangsa Iran dengan program nuklirnya, maka Amerika Serikat menggunakan kekuatan lobinya di Dewan Keamanan PBB. PBB yang banyak dikuasai oleh pengaruh Amerika Serikat pun akhirnya turun tangan dalam menangani kasus nuklir Iran ini. PBB yang nota bene banyak dalam pengaruh atau dalam kendali Amerika Serikat dipaksa untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran sehubungan dengan kekerasan kepala Iran tersebut dengan memberikan bukti-bukti yang menyudutkan Iran. Sanksi terakhir yang dijatuhkan kepada Pemerintah Iran adalah Resolusi DK PBB 1747 yang merupakan lanjutan dari Resolusi 1737.


Salah satu poin yang ada dalam Resolusi DK PBB 1747 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat adalah menyerukan agar memperluas pembekuan aset yang dimiliki Bangsa Iran yang merupakan lanjutan dari resolusi DK PBB nomor 1737, dan juga sanksi bagi mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Dengan adanya seruan untuk membekukan semua aset-aset milik Pemerintah Iran

yang ada di semua negara anggota PBB, ini sangat berpengaruh besar terhadap keadaan ekonomi dalam negeri Iran.

Di sisi lain, keberhasilan Amerika dalam memprakarsai agar DK PBB menjatuhkan resolusi berantai terhadap Iran, ini memberikan legitimasi baru kepadanya untuk menekan ekonomi Iran dengan berdasarkan pada resolusi terakhir 1747 di mana seluruh negara anggota PBB harus melaksanakan isi resolusi itu. Dan ini sebuah jalan lurus yang telah siap bagi Amerika untuk menekan dan mengasingkan Iran dari negara-negara dunia.

Rancangan sanksi juga menyerukan semua negara untuk mewaspadai kegiatan lembaga-lembaga keuangan di negara mereka dengan semua bank yang beroperasi di Iran, khususnya dengan Bank Melli dan Bank Saderat, dan cabang-cabangnya di luar negeri, agar menghindari aktivitas yang mendukung program nuklir Iran, atau pengembangan sistem pengiriman senjata nuklir. Rancangan lain juga yaitu mengenai inspeksi kargo, rancangan resolusi itu mendesak semua negara untuk memeriksa kargo yang diangkut lewat udara, laut, dan darat ke dan dari Iran, karena memungkinkan memuat barang-barang terlarang.

Amerika Serikat juga membekukan aset empat perusahaan Iran yang diduga berhubungan dengan program nuklir Teheran. Wakil Menteri Bidang Terorisme dan Intelijen Keuangan Departemen Perbendaharaan Amerika Serikat Stuart Levey menilai Iran telah lama mengembangkan nuklir dan menentang komunitas internasional. "Kami akan mengambil tanggung jawab untuk membuat



perhitungan atas kelakuan mereka (Iran)," kata Levey. Gedung Putih menduga kuat dua perusahaan, yakni Pars Tarash dan Farayand Technique, dimiliki dan dikontrol oleh Badan Energi Atom Iran --Atomic Energy Organization of Iran-- atau anak perusahaannya, The Kalaye Electric, Co.

Departemen Perbendaharaan Amerika Serikat menilai, *Atomic Energy Organization of Iran* merupakan fasilitas riset dan pengembangan utama dalam teknologi nuklir Iran. Pasalnya, lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Iran itu mengelola seluruh program nuklir Teheran. Sedangkan dua perusahaan lainnya, *Fajr Industries Group* dan *Mizan Machine Manufacturing Group*, diduga dimiliki *Iran's Aerospace Industries Organization*. Lembaga ini di bawah Kementrian Pertahanan Iran dan mengelola seluruh program missile Iran.

Melalui pembekuan ini, bank yang mengelola rekening atau aset keuangan lain milik keempat perusahaan juga bakal dibekukan. Amerika akan melarang hubungan bisnis dengan keempat perusahaan tadi. Kebijakan Amerika berawal dari pertemuan pemimpin delapan negara yang tergabung dalam kelompok G-8 di Heiligendamm, Jerman. Mereka memperingatkan Iran atas kisruh program Nuklir.

Amerika Serikat juga agotot untuk disahkannya embargo yang sifatnya parsial, luas serta memiliki tujuan jelas. Ini dikarenakan adanya tujuan Amerika Serikat agar diberikannya hak kepada Amerika untuk memeriksa kapal-kapal dagang Iran dengan alasan untuk menggagalkan penyelundupan bahan mentah pembuat bom nuklir dan rudal. Ini dapat menjadi sebuah alasan untuk memunculkan konflik militer terbatas. Dengan ini, Amerika dapat menjustifikasi

kehadiran militernya dan juga NATO di Teluk Persia.

Amerika mengklaim bahwa embargo persenjataan dan nuklir terhadap Iran akan membuat Iran mengimpor bahan-bahan mentah yang dibutuhkannya dengan harga mahal dari negara ketiga. Kebutuhannya ini akan dibawa lewat kapal-kapal dagang dan dengan alasan melaksanakan keputusan PBB Amerika dengan mudah dan secara luas dapat memeriksa kapal-kapal dagang Iran. Ini akan sangat mempengaruhi perdagangan luar negeri Iran sehingga keadaan ekonomi dalam negeri Iran akan terganggu.

2. Sanksi Politik

Penjatuhan sanksi buat Iran oleh Dewan Keamanan (DK) PBB memang membuat berang Teheran. Namun, bukan berarti setelah itu Ahmadinejad dkk lalu melunak dan mengikuti keinginan "komunitas internasional" terkait dengan program nuklir tersebut. Alih-alih setuju dengan ajakan ke meja perundingan kembali oleh Uni Eropa, Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki bahwa sanksi politik dan ekonomi yang paling keras sekalipun tak akan mengubah kebijakan Iran. "Dunia harus tahu bahwa walaupun sanksi politik dan ekonomi yang paling keras atau ancaman-ancaman lain terlalu lemah untuk memaksa rakyat Iran melepaskan tuntutan hukum dan sah mereka," tegas Mottaki dalam jumpa pers yang dilakukannya sehari setelah sanksi itu dijatuhkan.

Sebelumnya, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (EU) Javier Solana mengemukakan kepada wartawan di KTT Uni Eropa di Berlin, Jerman, bahwa pihaknya akan menghubungi Kepala Negosiator Nuklir Iran Ali Larijani "untuk menjajaki apakah kita dapat menemukan satu jalan bagi perundingan". Teheran juga menolak negosiasi yang bersifat penundaan program nuklirnya. Menurut Mottaki, itu bukan solusi bagi mereka. "Saya menegaskan pada anda bahwa tekanan dan intimidasi tidak akan dapat mengubah kebijakan Iran," katanya.

Salah satu sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat adalah sanksi politik. Amerika Serikat di bawah pemerintahan George W Bush terus menekan Iran dan menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Ini adalah salah satu cara Amerika Serikat untuk melemahkan posisi Iran dalam perpolitikan internasional.

Persoalan mengenai program pengayaan uranium yang dikembangkan oleh Iran telah lama menjadi isu utama pada pemerintahan George W. Bush. Namun perlu digarisbawahi di sini bahwa Amerika dibawah pemerintahan Bush tidaklah memiliki kekuatan yang sama sebagaimana dimiliki oleh Dewan Keamanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa/DK-PBB (*Security Council of the United Nations*). Amerika Serikat berusaha untuk membawa permasalahan ini kepada Dewan Keamanan dengan tujuan agar Iran dijatuhkan sanksi sehingga Iran menghentikan seluruh program pengayaan uraniumnya. Disebabkan penyerangan terhadap Irak oleh Amerika dan sekutunya telah melahirkan banyak kritikan tajam dari berbagai kalangan, oleh karenanya dalam kasus Iran ini Amerika Serikat tidak lagi

menggunakan tindakan unilateral sebagaimana dilakukan dalam kasus penyerangan Irak. Amerika Serikat di sini ingin memanfaatkan peran Dewan Keamanan dan meyakinkan anggotanya bahwa sanksi terhadap Iran amatlah diperlukan dan kemudian barulah mereka dapat melakukan berbagai tindakan untuk menyerang Iran.

Kebijakan politik Amerika Serikat juga mengalami perubahan cukup signifikan, setelah Presiden George W Bush dan Partai Republik naik ke tampuk kekuasaan di Washington. Amerika Serikat cenderung mengabaikan legalitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tatanan pergaulan internasional, dan kepentingan mitranya di Eropa. Washington tampak lebih memilih menjaga kepentingannya dengan menggunakan kekuatan militernya. Fenomena itu yang diperlihatkan Amerika Serikat di Afghanistan, Irak, dan mungkin juga di negara lain.

Kubu garis keras di Washington yang praktis kini memegang kendali kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, memicu kecemasan atas masa depan hubungan Iran-Amerika Serikat meskipun pemerintahan Presiden Khatami telah menunjukkan sikap akomodatifnya terhadap realita baru di kawasan Timur Tengah. Para pejabat teras Iran sering kali menyampaikan keinginannya untuk menggelar dialog dengan Pemerintah Amerika Serikat, membahas semua aspek persoalan, termasuk isu nuklir.

Namun, sejauh ini Pemerintah Amerika Serikat belum memberikan reaksi positif atas sinyal keinginan dialog dari Pemerintah Iran itu. Wacana hubungan

tegang Iran-Amerika Serikat pun akan terus menjadi retorika dalam waktu yang sulit diprediksi. Apalagi diperburuk oleh aksi unjuk rasa mahasiswa Iran selama sepekan ini. Iran telah menuduh Amerika Serikat berada dibalik aksi unjuk rasa tersebut.

Pemerintah Amerika Serikat dalam menyikapi kasus nuklir Iran ini, sangat keras. Amerika Serikat sangat gencar melakukakn desakan-desakan kepada Iran unuk merghendikan program nuklir mereka. Ini terlihat dari pernyataan pejabat-pejabat Gedung Putih yang begitu menentang program nuklir tersebut. Amerika juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk ikut campur dalam hal ini. Ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran selalu saja dibayangi oleh isu nuklir iri.

Pemerintah Amerika Serikat banyak menjatuhkan tuduhan-tuduhan kepada pemerintah Iran mengenai isu nuklir tersebut. Diantaranya seperti yang disampaikan oleh Direktur Akademi Internasional dan Ilmu Pengetahuan di Washington, David Albright, menuduh Iran berupaya secara rahasia mendapatkan informasi teknologi nuklir dan bahan-bahan uranium untuk pengembangan senjata nuklir. Ia juga menambahkan bahwa Lembaga Atom Nasional Iran adalah lembaga yang bertanggung jawab atas proyek rahasia tersebut. Beberapa pihak lain juga dari Amerika Serikat juga turut membeikan tuduhan kepada Iran, salah satunya yaitu CIA yang juga sangat mencurigai kunjungan delegasi Iran ke perusahaan tambang berat Alba di Kazakhstan yang menyuplai berbagai bahan tambang untuk perusahaan elektronik dan lembaga luar angkasa. Dimana dilaporkan bahwa,

perusahaan tersebut kelebihan uranium sebesar 600 kilogram dan delegasi Iran tengah berunding dengan pejabat setempat untuk membeli bahan uranium tersebut. Namun dikabarkan, Pemerintah Amerika Serikat berhasil memotong usaha Iran ini dengan cara melobi pemerintah Kazakhstan untuk menjual semua saham perusahaan yang bersangkutan kepada Amerika Serikat, ini untuk mencegah pihak Iran menguasainya.

Banyak kebijakan-kebijakan Amerika Serikat untuk menghentikan keinginan Republik Islam Iran untuk memiliki dan mengembangkan teknologi nuklir. Salah satu kebijakan yang membuat dunia internasional kaget adalah mengancam akan melakukan invasi ke Iran. Berdasarkan pengamatan para kritikus perang bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat bahwa Gedung Putih tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas dan keras jika Iran bertindak 'macam-macam' di Irak dan membahayakan pasukan keamanan Amerika Serikat. Akhirnya medan perang pun barangkali terbuka lebar siap untuk menjadi kubangan darah yang merambah dan menjadi saksi jutaan mayat terkapar tersayat

B. Penyebab AS Memberikan Kebijakan Terhadap Nuklir Iran

1. Terganggunya Kepentingan Ekonomi AS

Salah satu isu keamanan yang cukup mencolok sepanjang tahun 2004-2006 mungkin adalah internasionalisasi isu nuklir Iran. Amerika menuduh bahwa Iran hendak mengembangkan senjata nuklir yang dapat merubah

keamanan kawasan. Sedangkan, Israel yang sampai sekarang dicurigai memiliki senjata nuklir tidak digubris sama sekali oleh Amerika.

Hal ini tentu berkaitan dengan keadaan dalam negeri Iran itu sendiri. Hubungan Iran dengan Amerika memburuk semenjak tahun 1979, karena perubahan konstitusi negara yang membuat seorang *supreme leader* memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Iran menjadi negara teokratis. Disini kita bisa menemukan kepentingan Amerika dalam bidang keamanan, khususnya timur tengah, dimana AS memiliki kepentingan untuk mengamankan suplai minyaknya yang melalui teluk persia. Instabilitas kawasan akan mempengaruhi arus suplai impor minyak mentah Amerika dari timur tengah, AS juga khawatir karena Iran dinilai sebagai negara berbahaya yang dapat menyerang negara lain dengan nuklir, setidaknya menurut George W. Bush. Namun disisi lain, kita bisa memakai perspektif kepentingan ekonomi dalam melihat masalah ini, dan dalam hal ini, minyak bukan satu-satunya faktor paling berperan. Amerika membutuhkan minyak, tapi dia juga menginginkan agar dollar tetap berkuasa.

Pada tahun 2000, Saddam Hussein mengkonversi cadangan dollarnya ke Euro, dua bulan setelah AS menginvasi Irak, Program *Oil for Food* dihentikan, dan cadangan Irak dikembalikan ke Dollar. Pada tahun 2004, Iran mengumumkan untuk membentuk Bursa Minyak Iran dengan menggunakan euro sebagai nominalnya. Pada saat ini, 70 persen transaksi minyak di dunia menggunakan dollar. Hal ini juga bisa ditelusuri melalui sejarah, dimana pada

tahun 1971 diciptakan Bretton Wood system yang menjadi pijakan hegemoni dollar dalam transaksi internasional. Seluruh pembayaran pada institusi-institusi Bretton Woods seperti IMF dan World Bank harus menggunakan dollar sebagai mata uang yang sah. Faktor ini juga didukung karena Amerika merupakan pemenang dari PD II dan satu-satunya negara yang tidak rusak oleh perang besar tersebut. Amerika pada dasarnya merasa terancam akan keberadaan bursa minyak berbasis Euro yang akan dibangun Teheran, melebihi bahaya nuklir itu sendiri. Amerika tidak memiliki kepentingan ekonomi secara langsung karena tidak memiliki hubungan dagang resmi dengan Iran.

Pada 16 Juni 2003 Iran mengumumkan bahwa mereka menuntut Euro sebagai alat pembayaran dalam transaksi kepada negara yang tergabung dalam Asian Clearing Union (Bangladesh, Burma, India, Iran, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka) walau dollar masih dipakai sebagai indikator harga minyak. Euro digunakan menggantikan dollar dalam ekspor minyak bumi Iran ke Eropa dan Asia.

Tahun 2004 Iran mengumumkan akan niatnya membangun bursa minyak Iran di Teheran yang diprediksi akan menjadi pesaing bagi London's International Petroleum Exchange (IPE) dan New York Mercantile Exchange (NYMEX), dua bursa minyak yang dimiliki perusahaan Amerika. Dengan didirikannya bursa minyak berbasis Euro, maka akan mengurangi hambatan yang dialami negara-negara yang sudah menggunakan euro sebagai alat



transaksinya. Pembeli juga dihadapkan pada dua pilihan dalam membeli minyak, yakni yang ditawarkan IPE dan NYMEX yang seharga 50 dollar, dan minyak yang ditawarkan Bursa Teheran yang bisa berkisar 39-40 Euro.

OPEC sendiri menyambut positif akan perkembangan petroeuro. Javad Yarjani, eksekutif OPEC mengatakan pada tahun 2002 bahwa Euro akan dilirik sebagai alat pembayaran dalam OPEC jika Norwegia, dan Inggris telah menggunakan Euro sebagai mata uang mereka, dan jika terbukti bahwa Euro akan mengalami apresiasi dibandingkan dollar. Javad Yarjani menunjukkan keuntungan yang dapat diperoleh dengan penggunaan Euro dalam perdagangan minyak, yaitu mengecilnya risiko harga minyak dan risiko kurs yang positif bagi negara-negara pengimpor maupun pengeksport minyak. Hal ini bisa menjelaskan kenapa terjadi perpecahan dalam dewan keamanan. Rusia dan China bersikap lebih lunak terhadap Iran, sedangkan Amerika Serikat bersikap sebaliknya. China National Offshore Oil Corp telah mengadakan kontrak sebesar 12 triliun euro (16 triliun dollar) untuk mengembangkan ladang minyak Northern Pars dengan Iran. Sanksi menjadi tidak efektif karena Rusia dan China tidak memiliki persepsi yang serupa dengan Amerika.

Pernyataan-pernyataan provokatif Ahmedinejad juga lebih baik tidak dianggap serius karena dia tidak mewakili suara Iran. Terdapat tiga kelompok yang memiliki pandangan berbeda dalam masalah nuklir Iran. Pertama adalah kelompok konfrontasionis, yang lebih memiliki sikap konfrontasi dengan AS dalam masalah nuklir. Kelompok ini memiliki sikap

keras terhadap komunitas internasional dan tidak segan-segan memutuskan hubungan diplomatis ataupun menggunakan instrumen minyak untuk mencapainya, walau ini berarti membuat keadaan jadi lebih buruk. Ahmedinejad bisa dikategorikan dalam kelompok ini.

Kedua adalah kelompok yang cukup anti barat, namun memilih jalan diplomasi dalam kasus nuklir. Mereka meyakini jalan terbaik untuk kasus nuklir Iran adalah mengikuti keinginan internasional, walau hak memiliki nuklir adalah mutlak. Ali Larijani dan Rafsanjani berada di kelompok ini.

Kelompok ketiga adalah kelompok yang berpandangan bahwa kepemilikan senjata nuklir merugikan Iran, dan lebih baik dicegah untuk menghentikan kerugian potensial. Kelompok ketiga ini memiliki pengaruh yang tak terlalu signifikan, namun sudah mulai terlihat pengaruhnya dalam perkembangan terakhir. Mantan presiden Iran Mahmoud Khatami dan pemimpin tim negosiasi nuklir Iran, Hassan Rohwani bisa dikategorikan dalam kelompok ini.

Pada dasarnya, Ahmedinejad tidak memiliki kekuatan yang terlalu berarti di tubuh pemerintahan Iran. Dia membuat suatu sosok anti-barat karena memiliki motivasi untuk diakui sebagai kekuatan politik dalam negeri. Status presiden Iran sesungguhnya tidak memiliki kekuatan berarti dalam pemerintahan, karena yang berkuasa tetaplah Supreme Leader. Sikap konfrontatif Ahmedinejad dan pernyataan-pernyataan kerasnya akan Israel sesungguhnya dikritik oleh elit Iran, bahwa dia telah melangkah terlalu jauh.

Yang harus dikhawatirkan oleh Amerika adalah pernyataan Davoud Danesh Jafari pada Desember 2006, bahwa Iran akan mulai mengurangi transaksi penjualan minyaknya dengan nominal dollar secara bertahap, dan meningkatkan penggunaan Euro. Secara cerdas, media tidak meliput isu ini diantara derasnya pemberitaan mengenai program nuklir Iran. Amerika berhasil menyembunyikan bahwa hegemoni dollarnya sedang terancam, dan Iran adalah ancaman paling serius yang dapat melakukannya. Pada tahun 1975, dollar menjadi 76% cadangan negara-negara anggota IMF, jumlah ini menurun menjadi 65% pada tahun 2005, dan diperkirakan, trend penurunan dollar akan terus terjadi kedepannya. Jika itu terjadi, Amerika harus memikirkan cara untuk membiayai defisit perdagangannya, perang Irak, pembiayaan pangkalan-pangkalan militernya di seluruh dunia, sebelum Amerika mengalami imperial overreach seperti emporium Roma.

2. Kekhawatiran Akan Pembuatan Senjata Nuklir

Iran menjadi sangat populer saat ini, salah satunya dikarenakan oleh program pengayaan uranium yang dikembangkan oleh negara itu. Selain itu sikap dari presiden Iran sendiri, sebagai bagian Negara yang aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan Negara. Dan selain itu Iran saat ini begitu kental dan familiar dengan nama presiden Ahmadinejad. Bisa dikatakan kharisma yang ditebarkan oleh presiden Iran ini begitu mengena di hati para pecintanya dan sejumlah penduduk dunia yang kagum kesederhanannya serta keberaniannya menentang hegemoni Barat. Hal yang tak bisa dipungkiri bahwa

dibawah presiden Ahmadinejad, Iran kini menjelma menjadi Negara yang disegani di Timur Tengah. Kemampuan nuklir mereka menjadikan Negara-negara Barat menjadi khawatir dan ketar-ketir walaupun sebenarnya kebijakan nuklir Iran ini hanya untuk tujuan damai.

Hubungan luar negeri mereka Iran di bawah Ahmadinejad memperlihatkan kemajuan yang sangat besar. Tetapi satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa Iran masih belum dapat memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat. Kebekuan masih terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kedua belah pihak. Meskipun dari pihak Iran mengatakan bahwa Iran tidak menutup diri untuk menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, tetapi dengan syarat bahwa Negara tersebut mau merubah sikap mereka. Sedangkan dari pihak Amerika Serikat sendiri tidak memperlihatkan sikap-sikap yang ingin mengarah pada perbaikan hubungan kedua Negara.

Hubungan luar negeri Iran di dunia internasional akan sangat dipengaruhi image hubungan negara ini dengan Amerika Serikat. Mengingat sejarah hubungan kedua negara yang dalam beberapa tahun ini tidak pernah mengalami kemajuan yang berarti. Hubungan yang tak kunjung membaik ini tekad Iran untuk meneruskan teknologi nuklir mereka. Tekad yang dicetuskan oleh Presiden Ahmadinejad pasca terpilihnya sebagai pemimpin negeri itu. Dipihak lain Amerika Serikat dengan dalih menjaga perdamaian dunia dan mensinyalir adanya rencana Iran akan merubah orientasi teknologi nuklirnya untuk tujuan damai menjadi pengembangan senjata nuklir. Amerika

mengatakan bahwa apabila Iran memiliki senjata nuklir maka ini akan membahayakan stabilitas kawasan timur Tengah.

Pemerintah Amerika Serikat dalam menyikapi isu nuklir Iran ini, begitu keras. Amerika Serikat sangat gencar melakukan desakan-desakan kepada Iran untuk menghentikan program nuklir mereka. Ini terlihat dari pernyataan pejabat-pejabat gedung putih yang begitu menentang program nuklir tersebut. Amerika juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk ikut campur dalam hal ini. Ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran selalu saja dibayangi oleh isu nuklir ini. Pemerintah Amerika Serikat banyak menajutahkan tuduhan-tuduhan kepada Iran mengenai isu nuklir tersebut. Diantaranya seperti yang disampaikan oleh Direktur Akademi Internasional untuk Keamanan dan Ilmu Pengetahuan di Washington, David Albright, menuduh Iran berupaya secara rahasia mendapatkan informasi teknologi nuklir dan bahan-bahan uranium untuk pengembangan senjata nuklir. Ia juga menambahkan bahwa Lembaga Atom Nasional Iran adalah lembaga lembaga yang bertanggung jawab atas proyek rahasia tersebut. Beberapa pihak lain yang juga dari Amerika Serikat turut memberikan tuduhan kepada Iran, salah satunya yakni CIA juga sangat mencurigai kunjungan delegasi Iran ke perusahaan tambang berat Alba di Kazakhstan yang menyuplai berbagai bahan tambang untuk perusahaan elektronik dan berbagai lembaga luar angkasa. Dimana dilaporkan bahwa perusahaan tersebut kelebihan uranium sebesar 600 kilogram dan delegasi Iran tengah berrunding dengan pejabat setempat untuk membeli bahan uranium

tersebut. Namun dikabarakan, pemerintah Amerika Serikat berhasil memotong usaha Iran itu dengan cara melobi pejabat pemerintah Kazakhstan untuk menjual semua saham perusahaan yang bersangkutan kepada Amerika Serikat, ini untuk mencegah pihak Iran menguasainya.

Banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan keinginan Iran untuk memiliki dan mengembangkan teknologi nuklir. Mengancam untuk melakukan invasi militer adalah salah satunya. Hal ini dikarenakan oleh hasil penelitian dan penyelidikan badan atom internasional (IAEA). IAEA mengatakan bahwa tuduhan Iran memiliki senjata nuklir berkaitan dengan aktivitas pengayaan uraniumnya adalah tidak terbukti. IAEA mengatakan bahwa Iran agak lambat dalam aktifitas pengayaan uraniumnya. Ini mengindikasikan Iran menghadapi persoalan teknis. Sebelum Iran bias membuat bom nuklir, Iran harus menguasai teknologinya dulu bukan hanya pengayaan.

Ancaman yang pernah dilontarkan pemerintah Amerika Serikat tersebut, hanya sebuah gertakan untuk Iran yang masih terus keras kepala dan tidak pernah mau menurut pada Amerika Serikat. Dilain pihak juga Amerika Serikat harus memperhitungkan potensi potensi yang dimiliki Iran saat ini apabila mereka harus menginvasi Iran. Iran yang selama ini dicap sebagai poros setan bersikeras dengan pendirian mereka untuk terus melanjutkan program pengayaan uraniumnya. mereka mengatakan bahwa Iran berhak untuk mengembangkan teknologi itu karena mereka bertujuan menggunakan untuk

kebutuhan damai. Amerika Serikat yang merasa khawatir dengan kemampuan yang dicapai Iran saat ini, tidak tinggal diam. Setelah tidak mampu mengubah keputusan bangsa Iran dengan program nuklirnya, maka Amerika menggunakan kekuatan lobinya di Dewan Keamanan PBB. PBB yang banyak dikuasai oleh pengaruh Amerika Serikat pun akhirnya turun tangan dalam menangani masalah nuklir ini. PBB yang nota bene banyak dalam pengaruh atau kendali Amerika Serikat dipaksa untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran sehubungan dengan kekeraskepalaan itu. Tetapi sampai saat ini upaya untuk menghentikan program nuklir tersebut belum terwujud. Yang menjadi pertimbangan lain Amerika Serikat untuk tidak menyerang Iran sampai saat ini adalah faktor biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk serangan militer ke Iran kemungkinan lebih besar dari keuntungan yang akan didapat. Bias dikatakan bahwa serangan militer pada kasus ini tidak akan banyak manfaatnya. Malahan itu hanya akan semakin memacu Iran untuk membangun program nuklir untuk pengembangan pertahanan. Meskipun indikasi untuk Iran menuju ke arah sana akan selalu ada.

Penerapan kebijakan Iran tentang nuklir negara tersebut, menjadi hal yang cukup menyita perhatian publik dunia. Tak heran Amerika Serikat yang memiliki pengalaman sejarah yang kurang baik dengan Iran tidak dapat tinggal diam. Ketegangan kedua Negara ini juga sangat terlibat berkaitan dengan isu nuklir Iran ini. Amerika Serikat adalah Negara barat yang vocal menyerukan penghentian program nuklir Iran tersebut. Selain Amerika Negara lain yang

turut merasa terancam dan sangat tidak senang dengan pencapaian teknologi Iran itu adalah Israel. Meskipun ada beberapa Negara Eropa yang turut menganjurkan pada Iran untuk menghentikan program nuklir mereka. Tetapi beberapa Negara Eropa ini masih terus berusaha menempu jalan diplomasi. Negara-negara Eropa tersebut masih terus mengajak Iran untuk duduk bersama membahas program nuklir mereka. Perundingan-perundingan yang terus dikawal oleh Dewan Keamanan PBB ini masih terus berjalan. Perundingan ini diharapkan bias menghasilkan sebuah keputusan yang bias menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam kancah perpolitikan internasional, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran akan selalu menarik untuk diikuti. Terlebih lagi dengan adanya seorang presiden Iran seperti Ahmadinejad yang sangat berani dan begitu percaya diri menarik perhatian Negara yang dikatakan sebagai Setan Besar oleh Imam Khomeini ini. Ahmadinejad sangat tereng-terangan memperlihatkan sikap kerasnya itu kepada pemerintah Bush. Ahmadinejad yang begitu gencar mengatakan ketidaksetujuannya terhadap hegemoni Barat. Bukannya Ahmadinejad tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan kedua Negara. Ia selalu berusaha mengajak Amerika Serikat untuk berdialog. Ia pernah mengirimkan sebuah surat kepada presiden Bush untuk hal tersebut tapi tidak ditanggapi oleh pemerintah Amerika Serikat. Disini terlihat bahwa ada pertimbangan kedua Negara untuk melakukan pembicaraan mengenai kasus nuklir ini.

Alasan yang dikatakan oleh seorang analis mengapa Amerika Serikat tidak menanggapi ajakan preseiden Iran, adalah bahwa Amerika Serikat meyakini bahwa Iran tidak serius dengan undangan dialog tersebut. Selain itu pihak Amerika sendiri belum memutuskan atau bisa dikatakan belum menginginkan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Iran. Amerika Serikat masih terus berharap pada Iran untuk menghentikan hal-hal yang membuat Amerika Serikat menjadi gundah, tetapi Iran malah semakin bertingkah saja. Dukungan pemerintah Iran terhadap Hizbullah adalah salah satu faktor keengganan Amerika Serikat meladeni keinginan Iran untuk berdialog. Amerika yang telah mencap kelompok Hizbullah sebagai gerakan teroris, dalam hal ini Amerika Serikat sudah memiliki pandangan yang sangat bertentangan dengan pemerintah Iran. Campur tangan Iran yang dirasakan oleh pemerintah Amerika Serikat di Irak adalah hal yang membuat pemerintah Amerika Serikat menjadi sangat terusik, dan satu hal yang paling hangat saat ini adalah pengayaan uranium Iran. Amerika sangat tidak menyetujui hal ini dan menyuruh Iran untuk menghentikannya. Tetapi pada kenyataannya Iran tidak mau menghentikan program tersebut. Mereka tetap bersikukuh untuk melanjutkan program yang menurut mereka sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi bangsa Iran dan sebagai suatu hal yang mengancam bagi Amerika Serikat.

Prof. Vali Nasr yang merupakan pakar politik Islam dan pengajar di Naval Postgraduate School bidang politik timur tengah dan Asia selatan

meberikan analisisnya. Ada isu-isu spesifik yang tidak mungkin mengubah hubungan Iran dan Amerika Serikat secara keseluruhan. Iran beragumen bahwa jika menuruti apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat maka Iran akan berada pada posisi yang sangat sulit. Ahmadinejad pernah berkata, "Jika kita menyerahkan program nuklir kita, mereka akan meminta hak-hak hewan"¹⁷.

Amerika Serikat yang merasa bahwa program nuklir Iran sangat membahayakan kawasan Timur Tengah dan dunia, sehingga untuk membuat Iran menghentikan program nuklirnya pemerintah Amerika Serikat mengatakan akan menginvasi Iran. Tetapi pemerintahan Bush menegaskan dan mengatakan akan mengutamakan penyelesaian diplomatic atas isu nuklir Iran, walaupun begitu Amerika Serikat tetap tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Sehubungan dengan akan adanya kemungkinan invasi Amerika Serikat ke Iran, Iran mengeluarkan ancaman akan menyerang kepentingan Amerika Serikat di seluruh dunia jika negeri di Teluk Persia ini sampai diserang terkait isu nuklir. Ancaman ini tentu tidak main-main karena ini langsung dikeluarkan oleh Ayatollah Ali Khomeini pemimpin spiritual yang sangat berwibawa dalam tat kenegaraan Iran. Ancaman ini dikeluarkan pada hari Kamis 8 Februari 2007 semakin menandakan hubungan yang sangat rawan antara kedua pemerintah.

¹⁷ <http://kompas.com/kompas-cetak/0306/26/ln/379597.htm>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya teknologi nuklir, Iran akan memperoleh *bargaining position* yang lebih besar di kawasan Timur Tengah maupun di dunia internasional. Iran menginginkan peranan yang lebih besar di kawasan Timur Tengah, mengingat selama ini Israel mendominasi hampir seluruh kekuatan militer maupun politik di kawasan tersebut.
2. Dibalik kebijakan Amerika Serikat yang melarang program nuklir Iran karena alasan pengembangan senjata pemusnah massal sebenarnya ada kepentingan lain yang diinginkan Amerika Serikat. Dimana Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk mengamankan suplai minyaknya yang melalui Teluk Persia. Instabilitas kawasan akan mempengaruhi arus suplai impor minyak mentah Amerika dari timur tengah. Amerika juga menginginkan agar dollar tetap berkuasa karena pada tahun 2004, Iran mengumumkan untuk membentuk bursa minyak Iran dengan menggunakan Euro sebagai nominalnya.
3. Perselisihan kedua negara antara Amerika Serikat dan Iran mengenai program nuklir masih berlangsung sampai saat ini walaupun sanksi dijatuhkan lewat

resolusi DK PBB 1747. resolusi itu memuat antara lain mengenai sanksi ekonomi dan sanksi politik.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk tidak bersikap diskriminasi terhadap kasus nuklir Iran hanya karena adanya kepentingan ekonomi dimana mata uang Amerika Serikat yang selama ini menjadi alat transaksi dalam penjualan minyak Iran kini diganti dengan mata uang Euro.
2. Diharapkan kepada kedua pemerintah yaitu Amerika Serikat dan Iran agar secepatnya menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara damai melalui diplomasi sehingga masalah nuklir Iran ini tidak membuat kedua negara sampai berperang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas Bakri., *Komunikasi Internasional, Peran dan permasalahannya*, Yayasan Kampus Tercinta, IISIP, Jakarta, 2003
- Agung, Anak Banyu Perwita, Yanyan Mochamad yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005
- Budiono, Kusumo Hamidjojo, *Hubungan Internasional: Kerangka Analisis*, Bina Cipta, Jakarta, 1987
- Frankel, J. *Hubungan Internasional*, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1990
- K. J. Holtzi, *Politik Internasional, Kerangka Analisis (Ter)*, Jakarta, 1982
- Krisna, Didi, *Kamus Politik Internasional*, Grasindo, Jakarta, 1993
- Kusumahamidjojo, Budiono, *Hubungan Internasional : Kerangka Analisis*, Bina Cipta, Jakarta, 1987
- R. Suprpto, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan perilaku*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Roy. S. L., *Diplomasi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Sugiono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabet, Bandung, 2007
- Wiriadmadja, Suardi, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994
- Yusuf, Suffri S. H., *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri : Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Tentang Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989

Internet

- <http://www.irib.com/worldservice/melayuRADIO/nuklir/resistensi.htm>
- <http://www.beritaiptek.com/zberita-beritaiptek-2006-03-02-Krisis-Nuklir-Iran:-Kebutuhan-Energi-vs-Pengembangan-Teknologi.shtml>
- [http://berita-dunia.infogoe.com/as masih sukai diplomasi untuk selesaikan masalah nuklir iran](http://berita-dunia.infogoe.com/as_masih_sukai_diplomasi_untuk_selesaikan_masalah_nuklir_iran)
- <http://abatasya.net/berita/benang-kusut-kasus-nuklir-iran.html>
- <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0605/05/ln/2630358.htm>
- <http://gunaryadi.blogsome.com/2006/06/08/proliferasi-nuklir-iran-dan-realpolitik/>
<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0510/14/opini/2122254.htm>
- <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0609/04/opini/2926815.htm>
- www.suarapembaruan.com/News/2006/12/29/Internas/int02.htm
- http://kapanlagi.com/h/0000076169_print.html
- http://www.waspada.co.id/opini/artikel/artikel.php?article_id=78300